

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, Jum. (2011). *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagaraksa.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadin, Muhjad. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Banjarmasin: Genta Publishing.
- Hadjon, Philipus M dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hapsani, Arie & Tience Elizabet. (2018). *Persiapan Lahan Perkebunan*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pertanian.
- HR, Ridwan. (2022). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Kumara, Agus Ria. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawati, Sururama & Amalia, Rizki. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendikia Press.
- Setiawan, Yudhi, dkk. (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, HAW. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yasin, M. Yaya & Fuady, M. Ikram Nur. (2022). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*. Makassar: Alaudin University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal

Nasution, Ali Imran & Taupiqqurrahman. (2020). “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. II, No. 1, Juni 2020. Jakarta: Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rachmawati, Andini, dkk. (2023). “Hubungan Eksternal dari Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Vol. 01, No. 02, September 2023.

Rasyid, Fachmi. (2014). “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan.” *Widyaiswara Network Journal*, Edisi 1, No. 4, Oktober-Desember 2014.

Wahyudi, Muhamad. “Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kalimantan Tengah.” *Anterior Jurnal*.

D. Dokumen Resmi dan Laporan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin. (2025). Rekapitulasi Laporan Bencana Kabupaten Merangin Tahun 2025. Merangin: BPBD Kabupaten Merangin.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin. (2024). Kabupaten Merangin dalam Angka 2024. Merangin: BPS Kabupaten Merangin.

Direktorat Jenderal Perkebunan. (2024). Statistik Perkebunan Indonesia 2023-2025. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Data Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019-2024. Jakarta: Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2019-2024. SIPONGI. Diakses dari sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran pada 23 November 2025

E. Internet

Kompas. (2019). Berbagai Kerugian yang Diderita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan. Diakses pada 23 November 2025, dari <https://sains.kompas.com/read/2019/09/18/190000523/berbagai-kerugian-yang-diderita-indonesia-akibat-kebakaran-hutan>

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Program Kementerian Kehutanan, Diakses dari <https://www.kehutan.go.id/program/FORESPROGRAM> pada tanggal 23 November 2025

